

## DAFTAR PUSTAKA

- andrianto, nico (2007). *Good e-government transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. malang: banyumedia publishing.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diunduh 23 april 2021. <https://covid-19.kemkes.go.id>
- oswar mungkasa. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *IV*, pp. 126-150. <https://journal.Bappenas.go.id>
- Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. Diunduh 29 maret, 2021. <https://Peraturan.BPK.go.id>
- Intruksi Presiden (2020). refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19). pp. 1-4. Diunduh 1 agustus, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id>
- saptono rahardjo. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020. Diunduh 31 juli, 2021. <https://covid19.hukumonline.com>
- sutedi, adrian. (2012). *aspek hukum pengadaan barang & jasa dan berbagai permasalahannya, Ed.2*. Jakarta: sinargrafika.
- helmi prasetyo yuwinanto. (2013). implementasi e-procurement pada pemerintah kota surabaya. *jurnal jejaring administrasi publik, no 1*, pp. 212-231. <http://journal.unair.ac.id/download-fulpapers-admpeod789f92cfull.pdf>

